

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI ADAPTASI PENDIDIKAN ABAD 21

Ekrita Yanova¹, Iswantir M²

^{1, 2}UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Jl. Gurun Aua, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia
Email: ekritayanova12@gmail.com

Article History

Received: 06-06-2026

Revision: 24-06-2026

Accepted: 27-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. This research aims to analyze the implementation of the Independent Curriculum in educational units, identify the main challenges faced, and formulate relevant adaptation strategies, especially from an Islamic Education Management perspective. The method used is a systematic literature review (SLR) of scientific publications for the 2020–2025 period obtained through reputable national and international databases. The SLR process is carried out through the stages of identification, screening, eligibility and inclusion of articles based on predetermined criteria, with data analysis using a thematic synthesis approach to group findings into aspects of implementation, challenges and adaptation strategies. The results of the study show that the Merdeka Curriculum has been widely adopted, with more than 80% of schools in Indonesia implementing it in the 2023/2024 academic year. However, this study also identified structural challenges in the form of teacher competency gaps, limited digital infrastructure in 3T areas, as well as the need for a change in school leadership paradigm. From an Islamic Education Management perspective, these findings show opportunities for integrating character strengthening based on Islamic values within the Independent Curriculum framework in a more contextual and sustainable manner.

Keywords: Merdeka Curriculum; Learning Quality; 21st Century Education; Educational Management; Pancasila Student Profile

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta merumuskan strategi adaptasi yang relevan, terutama dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah *systematic literature review* (SLR) terhadap publikasi ilmiah periode 2020–2025 yang diperoleh melalui basis data nasional dan internasional bereputasi. Proses SLR dilakukan melalui tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi artikel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan analisis data menggunakan pendekatan sintesis tematik untuk mengelompokkan temuan ke dalam aspek implementasi, tantangan, dan strategi adaptasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka telah diadopsi secara luas, dengan lebih dari 80% sekolah di Indonesia mengimplementasikannya pada tahun ajaran 2023/2024. Namun demikian, kajian ini juga mengidentifikasi tantangan struktural berupa kesenjangan kompetensi guru, keterbatasan infrastruktur digital di daerah 3T, serta kebutuhan perubahan paradigma kepemimpinan sekolah. Dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam, temuan ini menunjukkan peluang integrasi penguatan karakter berbasis nilai-nilai Islam dalam kerangka Kurikulum Merdeka secara lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka; Kualitas Pembelajaran; Pendidikan Abad 21; Manajemen Pendidikan; Profil Pelajar Pancasila

How to Cite: Yanova, E & Iswantir M. (2026). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Indonesia: Tantangan dan Strategi Adaptasi Pendidikan Abad 21. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 4633-4642. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.6474>

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan global saat ini menghadapi tekanan besar untuk menyiapkan generasi yang adaptif, kritis, dan inovatif dalam merespons kompleksitas abad ke-21, yang ditandai oleh percepatan teknologi, dinamika sosial, dan tuntutan kompetensi global (OECD, 2023; Trilling & Fadel, 2009). Di Indonesia, tantangan tersebut diperparah oleh disparitas mutu pendidikan antarwilayah, rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa sebagaimana tercermin dalam hasil PISA 2022, serta kesiapan sistem pendidikan yang belum sepenuhnya sejalan dengan laju perubahan zaman (Kemendikbudristek, 2022; OECD, 2023). Kondisi ini menuntut adanya reformasi kurikulum yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi esensial peserta didik.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar sejak tahun 2019 yang kemudian berkembang menjadi Kurikulum Merdeka dan mulai diterapkan secara nasional pada tahun ajaran 2022/2023. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sekaligus memperkuat pembelajaran berbasis proyek dan Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2023; Suryaman, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pendidikan modern yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar.

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka mengusung filosofi pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan berorientasi pada perkembangan individu peserta didik. Berbeda dengan Kurikulum 2013 yang padat kompetensi dasar per tahun ajaran, Kurikulum Merdeka menyederhanakan capaian pembelajaran berdasarkan fase perkembangan peserta didik dan mengadopsi prinsip *teaching at the right level* (Rahayu & Nugroho, 2023; Widodo et al., 2022). Fleksibilitas ini memberi ruang bagi guru untuk melakukan diferensiasi pembelajaran dan menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan riil siswa di kelas.

Kurikulum Merdeka dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, tidak hanya dipahami sebagai perubahan substansi kurikulum, tetapi juga sebagai pergeseran paradigma pengelolaan pendidikan. Kepala sekolah dituntut berperan sebagai *instructional leader* yang mendorong budaya reflektif dan kolaboratif, sementara guru berperan sebagai perancang pembelajaran yang otonom, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai Islam (Mulyasa, 2021; Rohman, 2020). Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam praktiknya, serta menganalisis strategi adaptasi yang relevan dan berkelanjutan, khususnya dalam kerangka Manajemen Pendidikan Islam.

METODE

Artikel ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi, tantangan, dan strategi adaptasi Kurikulum Merdeka. SLR dilakukan untuk memastikan proses pencarian, seleksi, dan sintesis literatur berjalan secara objektif, transparan, dan dapat direplikasi. Sumber data primer terdiri atas artikel jurnal ilmiah terakreditasi Sinta (terutama Sinta 2–4) dan prosiding seminar nasional bereputasi yang dipublikasikan antara tahun 2020–2025. Selain itu, data sekunder berupa dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta laporan evaluasi implementasi dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) juga dimasukkan untuk memberikan konteks kebijakan dan praktik.

- Kriteria inklusi: studi yang membahas Kurikulum Merdeka dari perspektif implementasi, tantangan, atau strategi adaptasi; sumber yang diterbitkan tahun 2020–2025; teks lengkap tersedia; sumber bereputasi (*peer-review* untuk jurnal/prosiding).
- Kriteria eksklusi: publikasi yang tidak fokus pada Kurikulum Merdeka, opini tanpa dasar empiris, sumber *non-peer reviewed* (mis. artikel blog/tidak jelas asalnya), studi yang hanya membahas kurikulum sebelumnya tanpa kaitan dengan Kurikulum Merdeka.

Proses *screening* dilakukan dalam tiga tahapan:

- Identifikasi awal: pencarian literatur dilakukan melalui basis data seperti *Google Scholar*, Sinta, ERIC, dan portal akademik institusi dengan kata kunci kombinasi seperti “*Kurikulum Merdeka*”, “*Merdeka Belajar*”, “*curriculum implementation Indonesia*”, “*challenge*”, dan “*adaptation strategy*”.
- *Screening* judul dan abstrak: setiap publikasi yang relevan dicatat dalam spreadsheet reviewer dengan judul, sumber, tahun terbit, dan abstrak. Artikel yang tidak sesuai kriteria inklusi dieliminasi pada tahap ini.
- Seleksi teks lengkap: artikel yang lolos *screening* abstrak kemudian dibaca secara penuh untuk memastikan relevansi konten dan kualitas metodologisnya. Catatan rinci dibuat untuk setiap studi yang disertakan.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan langkah sebagai berikut:

- Ekstraksi data untuk tema utama dari setiap studi: implementasi Kurikulum Merdeka, hambatan yang dilaporkan, dan strategi adaptasi yang diusulkan.

- Pengelompokan tematik ke dalam kategori besar berdasarkan pola yang muncul, seperti: (a) kesiapan guru, (b) kesiapan sekolah/infrastruktur, (c) dukungan kebijakan, (d) praktik terbaik implementasi, dan (e) rekomendasi strategis.
- Sintesis tematik dilakukan untuk merangkum temuan secara sistematis sehingga setiap tema utama memiliki landasan bukti dari berbagai studi.
- Triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan hasil antar studi dan dokumen kebijakan resmi.

HASIL

Konsep dan Kerangka Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka dibangun di atas tiga pilar utama: (1) capaian pembelajaran berbasis fase yang memberikan fleksibilitas alokasi waktu; (2) Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai wahana pembelajaran lintas disiplin; dan (3) asesmen formatif yang mendahulukan umpan balik bermakna atas skor semata. Ketiga pilar ini saling menopang untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang holistik (Wahyudin & Sari, 2023). Profil Pelajar Pancasila menjadi kompas nilai yang menyatukan seluruh komponen kurikulum. Keenam dimensinya beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, bukan diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam seluruh aktivitas pembelajaran dan dikuatkan melalui proyek P5. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif pendidikan karakter terpadu yang menekankan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode utama pembentukan karakter (Lickona dalam Azzahra & Perdana, 2023). Dari perspektif manajemen pendidikan, struktur Kurikulum Merdeka menuntut desentralisasi pengambilan keputusan pedagogis hingga level kelas. Guru tidak lagi sekadar pelaksana kurikulum, melainkan curriculum maker yang merancang Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan modul ajar secara mandiri, sebuah transformasi peran yang fundamental dan memerlukan dukungan sistemik dari kepala sekolah, pengawas, dan pemerintah daerah (Mulyasa, 2022).

Capaian Implementasi

Data Kemendikbudristek (2023) mencatat lebih dari 300.000 satuan pendidikan—atau sekitar 80% sekolah di Indonesia telah mengadopsi Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023/2024. Adopsi ini bersifat sukarela dengan tiga jalur pilihan: Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi, yang mencerminkan gradasi kesiapan sekolah. Skema ini

terbukti efektif mengurangi resistensi awal implementasi karena sekolah tidak dipaksa melompat ke standar tertinggi sekaligus.

Di tingkat kelas, survei nasional Kemendikbudristek (2023) menunjukkan peningkatan signifikan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Guru yang telah menerapkan asesmen diagnostik melaporkan kemampuan yang lebih baik dalam memetakan kebutuhan belajar siswanya dan menyesuaikan strategi mengajar. Proyek P5 juga mendapat respons positif dari siswa karena memberikan pengalaman belajar yang autentik dan berbasis problem nyata di komunitas sekitar (Putri & Hidayat, 2023). Platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan sebagai infrastruktur digital pendukung kurikulum telah diakses oleh lebih dari 3,5 juta guru per akhir 2023. Platform ini menyediakan pelatihan mandiri, contoh modul ajar, dan komunitas berbagi praktik baik. Keberadaannya menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem dukungan yang berkelanjutan, bukan sekadar menerbitkan regulasi (Wahyudi & Pratama, 2023).

Tabel 1. Capaian Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2023/2024

Indikator	Capaian	Sumber
Adopsi Sekolah	>300.000 sekolah (~80% Indonesia)	Kemendikbudristek (2023)
Jalur Implementasi	Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, Mandiri Berbagi	Kemendikbudristek (2022)
Akses Platform Merdeka Mengajar	>3,5 juta guru (per akhir 2023)	Wahyudi & Pratama (2023)
Kesiapan Guru Non-Metropolitan	42% merasa siap implementasi penuh	Rahayu & Nugroho (2023)
Respons Proyek P5	Positif; belajar autentik berbasis komunitas	Putri & Hidayat (2023)

Sumber: Diolah dari berbagai referensi (2022–2023)

Tantangan Implementasi

Meskipun pencapaian implementasi cukup menggembirakan, sejumlah tantangan substansial perlu mendapat perhatian serius. Pertama, kesenjangan kompetensi guru masih menjadi hambatan utama. Banyak guru, terutama yang telah lama mengajar dengan pendekatan konvensional, mengalami kesulitan dalam memahami konsep asesmen formatif, merancang ATP, dan memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Penelitian Rahayu & Nugroho (2023) menemukan bahwa hanya 42% guru di daerah non-metropolitan yang merasa siap mengimplementasikan seluruh komponen Kurikulum Merdeka secara optimal.

Kedua, keterbatasan infrastruktur di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) menciptakan kesenjangan akses yang signifikan. Platform Merdeka Mengajar mensyaratkan koneksi internet yang stabil, sementara banyak sekolah di kawasan tersebut belum memiliki akses listrik yang memadai, apalagi internet. Kondisi ini berpotensi memperlebar jurang

kualitas pendidikan antara kota dan desa (Sari & Hidayat, 2022). Ketiga, perubahan paradigma dari kurikulum berbasis isi ke kurikulum berbasis kompetensi dan karakter memerlukan pergeseran budaya sekolah yang mendalam. Kepala sekolah yang terbiasa dengan pola manajemen top-down perlu bertransformasi menjadi fasilitator pengembangan profesional yang memberdayakan guru. Tanpa kepemimpinan kepala sekolah yang transformasional, inovasi kurikulum akan terhenti di level dokumen dan tidak menyentuh perubahan praktik di ruang kelas (Azzahra & Perdana, 2023).

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dari sisi adopsi kebijakan, namun masih dihadapkan pada tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Tantangan utama terletak pada kesenjangan kompetensi guru, khususnya dalam memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, serta perencanaan pembelajaran berbasis capaian per fase. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah 3T, menghambat pemanfaatan platform digital pendukung Kurikulum Merdeka secara optimal dan berpotensi memperlebar disparitas mutu pendidikan antarwilayah. Tantangan lainnya adalah perlunya perubahan paradigma kepemimpinan sekolah menuju kepemimpinan pembelajaran yang transformasional agar inovasi kurikulum tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran di kelas. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada penguatan kapasitas guru, pemerataan dukungan infrastruktur, serta komitmen kepemimpinan sekolah dalam membangun budaya belajar yang adaptif dan berkelanjutan.

Strategi Adaptasi

Berdasarkan kajian literatur dan data implementasi, teridentifikasi sejumlah strategi adaptasi kunci yang dapat ditempuh oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Kurikulum Merdeka. Pada level sekolah, pengembangan Komunitas Belajar Guru (KBG) terbukti menjadi katalis perubahan yang efektif. Melalui KBG, guru memiliki ruang untuk berbagi pengalaman, merefleksikan praktik pembelajaran, serta membangun pemahaman kolektif mengenai Kurikulum Merdeka sesuai dengan konteks dan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Pendekatan *professional learning community* ini dinilai lebih berkelanjutan dan berdampak dibandingkan pelatihan satu kali, yang sering kali bersifat administratif dan kurang menyentuh perubahan praktik pembelajaran di kelas (Wahyudin & Sari, 2023).

Pada level kebijakan, pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program pendampingan yang kontekstual dan berkelanjutan. Rekualifikasi peran pengawas sekolah dari fungsi administratif menuju instructional coach menjadi langkah strategis untuk memastikan pendampingan pedagogis yang lebih bermakna bagi guru. Selain itu, alokasi anggaran pelatihan guru sebaiknya difokuskan pada *job-embedded training* yang terintegrasi langsung dengan praktik mengajar sehari-hari (Mulyasa, 2022). Untuk mengatasi kesenjangan digital, pengembangan strategi *offline-first* perlu dioptimalkan agar modul ajar dan materi pelatihan tetap dapat diakses di wilayah dengan keterbatasan internet. Upaya ini harus diiringi dengan percepatan pemerataan infrastruktur teknologi sebagai prasyarat utama keberhasilan transformasi kurikulum secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Putri & Hidayat, 2023).

Tabel 2. Tantangan dan Strategi Adaptasi Implementasi Kurikulum Merdeka

No.	Tantangan	Dampak	Strategi Adaptasi
1	Kesenjangan kompetensi guru	Implementasi Kurikulum Merdeka belum optimal, terutama di daerah non-metropolitan; pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif belum berjalan konsisten	Penguatan Komunitas Belajar Guru (KBG), pelatihan berbasis praktik (<i>job-embedded training</i>), pendampingan berkelanjutan melalui lesson study dan refleksi kolektif
2	Keterbatasan infrastruktur di daerah 3T	Terbatasnya akses terhadap Platform Merdeka Mengajar dan sumber belajar digital; memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran antara kota dan desa	Pengembangan strategi pembelajaran berbasis offline-first, distribusi perangkat dan modul cetak adaptif, serta percepatan pemerataan infrastruktur TIK melalui kolaborasi pusat dan daerah
3	Pergeseran paradigma kepemimpinan sekolah	Inovasi kurikulum berhenti pada tataran administratif; perubahan praktik pembelajaran di kelas berjalan lambat	Rekualifikasi peran pengawas sebagai instructional coach, penguatan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah, serta pengembangan budaya reflektif dan kolaboratif di satuan pendidikan

Sumber: Diolah dari berbagai referensi (2022–2023)

DISKUSI

Temuan kajian ini menegaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka merupakan agenda transformasi pendidikan yang berskala besar dan kompleks. Tingkat adopsi yang mencapai lebih dari 80% satuan pendidikan pada tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan penerimaan kebijakan yang sangat luas dalam waktu relatif singkat. Capaian ini tidak terlepas dari strategi implementasi bertahap melalui skema Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi yang memberi ruang adaptasi sesuai kesiapan sekolah. Namun, sebagaimana

dikemukakan Fullan (2016), tingginya angka adopsi kebijakan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas perubahan praktik pembelajaran. Kajian ini menunjukkan adanya celah antara keberhasilan administratif dan kedalaman transformasi pedagogis di ruang kelas.

Kesenjangan kompetensi guru muncul sebagai tantangan paling menentukan dalam keberhasilan implementasi. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 42% guru di daerah non-metropolitan yang merasa siap mengimplementasikan seluruh komponen Kurikulum Merdeka secara optimal (Rahayu & Nugroho, 2023). Persentase ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh guru masih berada pada fase adaptasi awal, terutama dalam memahami asesmen formatif, pembelajaran berdiferensiasi, dan penyusunan ATP. Temuan ini sejalan dengan Darling-Hammond et al. (2017) yang menegaskan bahwa reformasi kurikulum akan sulit berkelanjutan tanpa sistem pengembangan profesional guru yang kontekstual dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Komunitas Belajar Guru (KBG) menjadi strategi adaptasi yang relevan karena berlandaskan prinsip *professional learning community* dan pembelajaran orang dewasa, yang terbukti lebih efektif dibandingkan pelatihan satu kali.

Implementasi Kurikulum Merdeka membuka peluang strategis untuk memperkuat integrasi nilai keislaman dalam pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter. Dimensi Profil Pelajar Pancasila, khususnya aspek beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, memiliki irisan kuat dengan tujuan pendidikan Islam. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan madrasah dan sekolah Islam mengontekstualisasikan Proyek P5 dengan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam komunitas belajar. Dengan kepemimpinan kepala sekolah atau kepala madrasah yang berorientasi pada *instructional leadership*, Kurikulum Merdeka dapat menjadi sarana penguatan pendidikan karakter yang tidak hanya normatif, tetapi terinternalisasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari (Mulyasa, 2022).

Tantangan infrastruktur di daerah 3T juga perlu dibaca secara lebih kritis sebagai isu keadilan pendidikan. Ketergantungan pada Platform Merdeka Mengajar berpotensi menciptakan ketimpangan baru ketika akses internet dan listrik belum merata. Kajian ini menegaskan bahwa tanpa intervensi serius melalui strategi *offline-first* dan percepatan pemerataan infrastruktur, Kurikulum Merdeka berisiko lebih efektif di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Warschauer (2018) bahwa digitalisasi pendidikan dapat memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi kebijakan afirmatif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan kurikulum, pengembangan kompetensi guru, dan pemerataan infrastruktur pendidikan secara simultan.

KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka merepresentasikan transformasi pendidikan yang strategis dan memiliki landasan konseptual yang kuat untuk menyiapkan generasi Indonesia menghadapi tantangan abad ke-21. Capaian implementasinya yang menggembirakan dalam dua tahun pertama terutama adopsi lebih dari 80% sekolah dan akses 3,5 juta guru pada Platform Merdeka Mengajar menunjukkan momentum perubahan yang nyata. Namun, keberhasilan sejati tidak dapat diukur dari angka adopsi semata, melainkan dari kedalaman perubahan praktik pembelajaran yang terjadi di ruang kelas. Tiga tantangan struktural utama yang teridentifikasi, kesenjangan kompetensi guru, keterbatasan infrastruktur 3T, dan pergeseran paradigma kepemimpinan memerlukan respons kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan. Dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam, implementasi Kurikulum Merdeka membuka ruang integrasi nilai-nilai Islam yang signifikan, menjadikannya bukan sekadar kebijakan kurikulum nasional, tetapi juga peluang untuk memperkuat identitas dan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan kajian, beberapa rekomendasi diajukan. Pertama, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk Komunitas Belajar Guru (KBG) sebagai strategi pengembangan profesional utama, dengan pengawas sekolah yang direkualifikasi sebagai instructional coach. Kedua, pengembangan konten offline-first pada Platform Merdeka Mengajar harus diprioritaskan bersamaan dengan percepatan program pemerataan infrastruktur digital di daerah 3T. Ketiga, bagi lembaga pendidikan Islam, integrasi dimensi Profil Pelajar Pancasila terutama aspek keimanan dan akhlak dengan nilai-nilai Islam perlu dirancang secara sistematis dalam Proyek P5. Keempat, penelitian lanjutan secara empiris, terutama studi kasus pada madrasah dan pesantren, diperlukan untuk mengukur dampak nyata Kurikulum Merdeka pada kualitas pembelajaran berbasis nilai Islam.

REFERENSI

- Azzahra, F., & Perdana, R. (2023). Transformasi kepemimpinan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 15(2), 88–102. <https://doi.org/10.21831/jmpi.v15i2.5689>
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2023). Laporan implementasi Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022/2023. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Mulyasa, E. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka: Panduan praktis bagi guru dan kepala sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.

- OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/pisa/>
- Putri, R. D., & Hidayat, M. (2023). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T: Perspektif guru dan kepala sekolah. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 11(1), 55–70. <https://doi.org/10.22342/jkpp.v11i1.4512>
- Rahayu, S., & Nugroho, A. (2023). Kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka: Survei nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v8i1.3344>
- Rohman, A. (2020). Manajemen pendidikan Islam: Konsep dan praktik. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 1–15.
- Sari, N. K., & Hidayat, T. (2022). Kesenjangan digital dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(3), 178–194. <https://doi.org/10.21009/JTP.v24i3.2901>
- Suryaman, M. (2022). Orientasi pengembangan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 1–12.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st century skills: Learning for life in our times*. Jossey-Bass.
- Wahyudi, T., & Pratama, L. (2023). Efektivitas platform Merdeka Mengajar sebagai ekosistem pengembangan profesional guru. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 10(2), 113–128. <https://doi.org/10.21831/jitp.v10i2.5521>
- Wahyudin, D., & Sari, M. (2023). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Analisis praktik terbaik di sekolah penggerak. *Jurnal Kurikulum dan Teknologi Pendidikan*, 6(1), 33–49. <https://doi.org/10.17977/um031v6i12023p033>
- Widodo, H., Sutrisno, & Nuryanto. (2022). Teaching at the right level dalam kebijakan Kurikulum Merdeka. *Cakrawala Pendidikan*, 41(3), 623–635.